

**ISLAM DAN PANCASILA DALAM PERTARUNGAN IDEOLOGI
DUNIA: Perspektif Sosiologis**

Nur Syam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: nursyamtuban2018@gmail.com

S. Maryam Yusuf

IAIN Ponorogo

Email: maryamyusuf@iainponorogo.ac.id

Abstract: *This article discusses the relationship between Islam and Pancasila in the midst of the struggle for world ideology that continues to exist in the midst of the nation state. In the past, ideological battles took place between the United States and its allies with the Soviet Union and its allies. After the destruction of communist ideology in Eastern Europe under the rule of the Soviet Union, the ideology of capitalism seemed to be a single ideology which ruled over countries in many countries. Indonesia, which has Pancasila as an ideology of nationality, is certainly also suitable in the battle arena. In Indonesia, there was also an internal battle between political Islam, moderate Islam and Nationalist Islam. This position is interesting to be observed in the present and future era, in its consideration with how to practice Islam on the one hand with the practice of Pancasila on the other. So far many views have been expressed between Islam and Pancasila. Through library research by studying content analysis, it is concluded that the ideology of Pancasila has strength as a counterweight between ideological battles both internally and internationally. Pancasila has proven to be a unifying ideology for the Indonesian people.*

المخلص: كتبت هذه المقالة لأجل التصور عن حضور علاقة الإسلام ومبادئ الخمسة وسط مباراة الإيديولوجية العالمية. فمن المعلوم، حدث مباراة الإيديولوجية العالمية الماضية بين دولة Amerika Serikat وحليفهم مع دولة Uni Soviet وحليفهم. وعندما

الإيديولوجية الشيوعية للدول بأوروبا الشرقية هالكة، فأصبحت الإيديولوجية الرأسمالية أحد الإيديولوجية المستخدمة في مختلف الدّول. ولكن، لا يشترك دولة إندونيسيا وسط هذه المباراة. لأنّ الإيديولوجية المستخدمة في دولة إندونيسيا هي المبادئ الخمسة. ولكن الواقع، حدثت المباراة الداخلية بإندونيسيا بين الإسلام السياسية والإسلام الوسطية والإسلام الوطنية. فأصبحت المشكلة الواقعة حالية وآتية بإندونيسيا جذابة للبحث، ولاسيّما المشكلة في تنفيذ شريعة الإسلام بجانب تنفيذ المبادئ الخمسة كإيديولوجية الدولة. وبنسبة إلى آراء الجامع، فتبدو موقع الإسلام ومبادئ الخمسة في حالة المتطلبة وليست متناقضة. وبالإضافة إلى تنفيذ الدراسة المكتبية بنهج التحليل السياقي، فأخذ الكاتبان على النتيجة الآتية: استحققت الإيديولوجية بالمبادئ الخمسة القوّة لتوازن الإيديولوجية الدّاخلية من هجوم الإيديولوجية الدّولية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت المبادئ الخمسة كإيديولوجية لتوحيد الدولة الإندونيسيا.

Abstrak: Artikel ini menggambarkan tentang relasi Islam dan Pancasila di tengah pertarungan ideologi dunia yang terus hadir di tengah negara bangsa. Di masa lalu, pertarungan ideologi terjadi antara Amerika Serikat dan sekutunya dengan Uni Soviet dan sekutunya. Pasca kehancuran ideologi komunis di Eropa Timur di bawah kekuasaan Uni Soviet, maka ideologi kapitalisme seperti menjadi ideologi tunggal yang menguasai negara-negara di banyak negara. Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai ideologi kebangsaan tentu juga berada di dalam arena pertarungan tersebut. Di Indonesia, secara internal juga terjadi pertarungan antara Islam politik, Islam moderat, dan Islam Nasionalis. Posisi ini yang menarik untuk dicermati di era sekarang dan akan datang, dalam kaitannya dengan bagaimana mengamalkan Islam di satu sisi dengan pengamalan Pancasila di sisi lain. Sejauh ini banyak pandangan yang menyatakan bahwa antara Islam dan Pancasila bukanlah berada di dalam posisi berlawanan tetapi saling membutuhkan. Melalui penelitian kepustakaan dengan pendekatan content analysis, maka disimpulkan bahwa ideologi Pancasila memiliki kekuatan sebagai penyeimbang di antara pertarungan ideologi baik secara internal maupun

internasional. Pancasila telah membuktikan bisa menjadi ideologi pemersatu bagi bangsa Indonesia.

Keywords: *Islam politik, Islam moderat, dan Islam Nasionalis, Pancasila,*

PENDAHULUAN

Dunia sekarang dikenal sebagai dunia tanpa batas atau *borderless world*. Dunia yang tidak lagi disekat-sekat dengan batas-batas kewilayahan secara geografis. Yang masih menentukan akan kewilayahan tersebut adalah batas wilayah administrative kenegaraan.¹ Jika kita melakukan perjalanan, khususnya di Eropa Barat, maka rasanya kita seperti hanya berada di dalam satu wilayah tanpa batas geografis yang sangat tegas. Semenjak runtuhnya tembok Berlin, yang selama itu memisahkan secara geografis antara Jerman Barat dengan Jerman Timur, maka kala itu, batas kewilayahan menjadi makin tipis.²

Revolusi teknologi informasi tentu menjadi factor penting untuk menyatukan dunia dalam kawasan satu informasi. Jika di masa lalu, orang hanya bisa berkomunikasi dengan media-media yang terbatas, maka dewasa ini orang bisa saling terhubung meskipun jarak di antara mereka itu sangat jauh. Itulah sebabnya, dunia terasa menjadi sempit sebab selama daerah tersebut tersambung dengan jaringan komunikasi dan teknologi informasi, maka kala itu jaringan di antara manusia akan dengan mudah dilakukan.³

Sesungguhnya, dengan keberlangsungan teknologi informasi dan komunikasi, maka jarak antar satu wilayah dengan lainnya telah menjadi tidak lagi bermakna. Dalam hitungan detik, maka orang akan bisa mengakses berbagai

¹Istilah yang digunakan untuk menggambarkan dunia tanpa batas adalah globalisasi. Untuk penjelasan lebih mendalam periksa, A Qadri Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 1–5.

²Wilayah negara adalah wilayah administratif yang membatasi satu negara dengan negara lainnya. Menurut David Miller, 1995, sebagaimana dikutip oleh Wicaksono, bahwa hak kedaulatan teritorial terdiri dari tiga unsur, yaitu kedaulatan Ekonomi, Hukum, dan Teritorial. Periksa I Gede Wahyu Wicaksana, “Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolis,” *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 29, no. 2 (2016): 106–116. Negara harus memiliki rakyat, pemerintahan dan wilayah. Lihat juga id.m.wikipedia.org, diunduh 28 desember 2019.

³Sekarang kita sedang memasuki era yang disebut sebagai era Revolusi Industri 4.0. di era ini, maka yang sangat menonjol ialah berkembangnya Artificial Intelligent (AI), yaitu semakin banyaknya mesin atau robot yang cerdas dan dapat menggantikan fungsi manusia di dalam bekerja. Lihat Nur Syam, *Friendly Management: Kepemimpinan Sebagai Roh Manajemen* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 109–122.

ragam informasi dan juga jejaring dengan sesama manusia. Semenjak ditemukannya internet dan dampak ikutannya yaitu ditemukannya media sosial, maka jarak sudah tidak lagi menjadi halangan seseorang atau sekelompok orang untuk saling berkomunikasi.⁴

Melalui temuan teknologi informasi dan kedirgantaraan, juga dapat dengan mudah orang melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Semuanya memberikan gambaran bahwa migrasi dan komunikasi bukan lagi menjadi halangan kewilayahan di era sekarang. Bisa saja seseorang makan pagi di India dan makan malam di Jakarta. Atau bisa saja seseorang makan malam di Jakarta dan esok paginya sudah menikmati sarapan pagi di Melbourne Australia. Dengan teknologi informasi dan kedirgantaraan, maka jarak juga bisa dilipat dalam hitungan jam.⁵

Pada era globalisasi, dengan kekuatan pertarungan antar ideologi terutama melalui media sosial, ternyata ideologi-ideologi besar dunia, seperti kapitalisme, Pancasila dan Islam tetap bisa *survive* dan bahkan berkembang pesat. Kekuatan ideologi tersebut tentu difasilitasi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kekuatan ekonomi dan identitas keagamaan.

Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami tentang relasi antara Islam dan Pancasila di era pertarungan ideologi dunia. Pembahasan ini dirasakan sangat penting mengingat bahwa sekarang bangsa Indonesia sedang berada di suatu era globalisasi bahkan era Revolusi Industri 4.0. Tulisan ini diharapkan akan memberi manfaat bagi generasi sekarang atau yang akan datang dalam melihat betapa pentingnya *common platform* kebangsaan, yang dirajut melalui ideologi kebangsaan, Pancasila.

Perspektif sosiologis dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami relasi antara Islam dan Pancasila sebagaimana pandangan para ahli dalam memandang Pancasila dan Islam yang hidup di dalam kehidupan sosial. Di dalam realitas empirisnya, bahwa Pancasila dan Islam berada di dalam ruang kontestasi dengan

⁴Nur Syam, "Era Revolusi Industri 4.0 dan Pendidikan di Masa Depan (1)," <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.

⁵ Comelis Lay, "Nasionalisme dan Negara Bangsa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (November 2006): 165–180.

ideologi-ideologi lain, yang juga diinginkan untuk bisa direalisasikan di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara sosiologis, bahwa relasi antara Islam dan Pancasila bukanlah sesuatu yang saling berhadapan, tetapi adalah dua entitas yang sebenarnya menyatu di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Mengamalkan Islam yang baik sekaligus juga mengamalkan Pancasila yang baik dan menjadi warga negara yang baik.

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder, baik dokumen yang berupa buku, laporan penelitian, manuskrip, karya tulis di media massa, bahkan di media sosial yang akan dianalisis melalui metode *content analysis*. Langkah yang digunakan adalah dengan menyeleksi berbagai tulisan yang relevan dengan pokok tema pembahasan, lalu mengkategorikan atau mengklasifikasi tulisan siapa dan apa masuk pada bagian mana, kemudian menganalisisnya sesuai dengan prinsip-prinsip karya ilmiah, yaitu logis, relevan, dan ilmiah. Sebagai tulisan berbasis dokumen maka semua karya ilmiah yang dicitasi dianggap memiliki kekuatan yang sama dan dipandang sebagai sumber utama.

IDEOLOGI-IDEOLOGI DOMINAN

Secara historis, sebenarnya hanya ada dua ideologi⁶ dominan di dunia, yaitu ideologi kapitalisme dan sosialisme. Dua ideologi inilah yang dalam kurun waktu sangat panjang berada di dalam posisi berseberangan. Bahkan dua ideologi tersebut juga menghasilkan penggolongan ideologis antara Blok Timur dan Barat dan juga memunculkan konflik berkepanjangan.⁷

Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan seluruh sekutunya dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan seluruh sekutunya telah

⁶ Menurut Karl Mannheim, bahwa ideologi itu memiliki corak pemikiran subyektif, yang secara umum dinyatakan sebagai pengetahuan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ideologi merupakan keyakinan. Lihat Karl Mannheim, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik* (Jakarta: Kanisius, 1991), 59–73. Sementara itu juga ada yang mendefinisikan Ideologi adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran. Lihat Lembaga Ketahanan Nasional RI, *Pancasila di Era Globalisasi: Mengelola Tantangan Mewujudkan Kemenangan* (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI-PPSA XXI, 2017), 61.

⁷ Pertarungan atau konflik keras antara US dengan USSR terjadi semenjak lahirnya USSR, 25 Oktober 1917 sampai runtuhnya USSR, 25 Desember 1991. Periksa “Sejarah Runtuhnya Uni Soviet-Penyebab, Proses dan Akibat Keruntuhan,” Sejarahlengkap.com, t.t., diakses 2 Maret 2020.

menjadikan dunia selalu berada di dalam bibir jurang peperangan. Bertahun-tahun suasana ketegangan antara Blok Barat dan Timur ini berada di dalam nuansa “peperangan”. Maka kemudian dikenal istilah “perang dingin” untuk menggambarkan relasi konfliktual antara barat dan timur.⁸

Di dalam konteks untuk menjembatani di antara dua ideologi dominan ini, maka Indonesia mengembangkan Gerakan Non-Blok untuk menegaskan posisi negara-negara yang secara diametral tidak terkooptasi di antara keduanya. Melalui wadah Gerakan Non-Blok ini sebenarnya akan terdapat keseimbangan di dalam memandang relasi antara Barat dan Timur. Melalui Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung, maka Gerakan Non-Blok memperoleh momentum sebagai penyeimbang diantara kedua blok tersebut. Soekarno dan Tito adalah dua nama di antara sekian banyak tokoh dunia yang mendukung Gerakan Non-Blok ini.⁹

Di dalam kerangka untuk memberikan gambaran bahwa bloknnya yang lebih unggul, maka perlombaan persenjataan juga terjadi secara luar biasa. Makanya anggaran untuk menghasilkan peralatan perang menjadi luar biasa. Amerika dan Uni Soviet saling berlomba untuk menganggap bahwa dirinya yang lebih unggul.

Sayangnya bahwa Gerakan Non-Blok akhirnya tidak lagi mampu mempertahankan kenonblokannya dan terkooptasi ke dalam salah satu di antaranya Indonesia sebagai pemrakarsa Gerakan Non-Blok akhirnya juga harus terjerebab ke dalam pelukan Blok Timur melalui Cina atau yang disebut sebagai Poros Jakarta-Peking. Namun demikian, sekurang-kurangnya bahwa Indonesia

⁸Perang dingin merupakan ketegangan politik dan militer antara Amerika Serikat dengan sekutunya dan Uni Soviet dengan sekutunya. Novita Mujiati, Kusworo, dan Sunaryo, “United State During the Cold War 1945-1990, Vol.4, No. 1, tahun 2016, hlm. 39-54.” *Jurnal Historia* 4, no. 1 (2016): 39-54.

⁹ Gerakan Non-Blok terdiri dari lebih dari 100 negara dan sebagaimana diketahui bahwa Gerakan Non Blok (GNB) merupakan hasil dari pertemuan Asia Afrika yang dilaksanakan di Bandung, 1955. Lihat Dika Dwimawan Wuryanto dan Septina Alianingrum, “Indonesia Sebagai Tuan Rumah KTT Gerakan Non Blok X Tahun 1992,” *Avatara: e-Jurnal Sejarah Pendidikan* 5, no. 2 (Juli 2017): 289-297.

telah mencatat sejarah yang bagus sebagai kekuatan penyeimbang antara relasi Barat dengan Timur dalam sejarah gerakan ideologi dunia.¹⁰

Ideologi sosialisme yang direpresentasikan oleh komunisme pun kemudian menemui kehancurannya. Rusia yang dahulu sangat *powerfull* kemudian tercabik-cabik dan menjadi negara-negara kecil yang kemudian tidak jelas ideologinya. Barat tidak, Timur juga tidak. Jika masih ada sisa-sisanya, maka sesungguhnya ideologi-ideologi tersebut hanyalah merupakan warisan sejarah yang mesti diikuti tanpa kesadaran untuk mempertahankan dan mengamalkannya.¹¹

Kala Rusia hancur dengan segala ideologinya, maka keruntuhan ideologi komunisme di tempat lain juga tidak terhindarkan. Hanya tinggal beberapa negara saja yang masih memegang prinsip ideologi ini, misalnya Korea Utara, China, dan beberapa Negara Amerika Latin, yang tentu sudah melakukan modifikasi secara prinsipil terhadap ideologi ini. Yang spektakuler tentu adalah China yang kemudian menerapkan sistem baru, dimana ideologi komunisme dibenahi sementara juga mengadaptasi ideologi kapitalisme sebagai bagian tidak terpisahkan di dalam sistem pemerintahan. China kemudian termasuk negara yang sukses di dalam merenda kekuatannya ekonominya melalui sistem yang *modified* dimaksud.¹²

Pasca kehancuran ideologi komunisme, maka hanyalah tinggal ideologi kapitalisme yang menguasai percaturan ideologi dominan di dunia. Namun demikian, kapitalisme juga mengalami perombakan yang cukup signifikan. Jika di masa lalu bahwa ideologi ini murni terkait dengan “pasar” atau dalam konteks ekonomi disebut sebagai “pasar bersaing bebas”, sehingga pasarlah yang berkuasa terhadap dunia perekonomian dalam ideologi kapitalisme, maka dewasa ini juga

¹⁰Nur Syam, *Transisi Pembaharuan, Dialektika Islam, Politik dan Pendidikan* (Surabaya: LEPKISS, 2008), 7–13.

¹¹ Di Eropa Timur yang dahulu berada di dalam kekuasaan Uni Soviet, maka sekarang pecah menjadi negara-negara yang menggunakan demokrasi sebagai salah satu piranti dalam sistem pemerintahan. Pecahan Uni Soviet tersebut terdiri dari 15 negara setelah USSR bubar pada bulan Desember 1991. Periksa “Negara-Negara Bekas Uni Soviet,” id.m.wikipedia.org, t.t., diakses 29 Desember 2019.

¹² Sistem ekonomi China adalah sistem ekonomi campuran antara sosialis, kapitalis dan komunis. Melalui sistem ini maka perekonomian China menjadi meningkat sangat pesat. Keluar menggunakan sistem ekonomi *capital* dan ke dalam menggunakan sistem ekonomi komunis dan sosialis. Lihat “Sistem Perekonomian China,” ikaamalia1807.blogspot.com, t.t., diakses 29 Desember 2019.

mengalami perombakan mendasar. Di antaranya adalah yang disebut “pasar sosial” atau *social market*. Di Jerman dan beberapa Negara Eropa lainnya sudah menerapkan modifikasi ideologi kapitalisme ini dengan cara mengadaptasi dimensi “*social*” yang merupakan pola penggabungan antara konsep kapitalisme “pasar” tetapi dimasuki dengan konsep “sosial” yang sesungguhnya merupakan kata kunci di dalam ideologi sosialisme.¹³

Pasca kehancuran Uni Sovet, maka diperkirakan bahwa sudah tidak akan ada lagi ideologi dunia yang akan dapat melawan kehebatan kapitalisme modern yang diusung oleh Amerika dan seluruh kerabat dekatnya. Yaitu seluruh daratan Eropa Barat dan juga beberapa Negara Asia dan Afrika yang pro terhadap gerakan kapitalisme modern. Di Asia misalnya Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di Afrika seperti Maroko, Mesir dan lainnya.

Sehubungan dengan kehancuran ideologi Komunisme ala Uni Soviet, maka yang dianggap potensial menjadi ideologi dominan adalah Islam. Agama ini dianggap oleh beberapa penulis Barat memiliki potensi untuk menjadi ideologi dunia. Lihat misalnya “kebangkitan” ideologi Mullah di Iran, perlawanan kaum fundamentalis di beberapa Negara Timur Tengah terutama pasca Arab Spring, perlawanan kaum Mujahidin di Afghanistan dan beberapa lainnya.¹⁴

Dengan demikian, yang sesungguhnya terjadi adalah *mixed* berbagai ideologi yang kemudian dijadikan sebagai suatu jalan atau arah untuk memperoleh kekuasaan. Jika dicermati secara mendalam, maka sebenarnya yang terjadi adalah adanya keinginan memastikan sebuah kekuasaan diperoleh atau keinginan untuk memperkuat dan memperpanjang kekuasaan.

¹³ Sistem ekonomi ini disebut sistem ekonomi pasar sosial, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan menggabungkannya dengan kebijakan sosial. Periksa, “Ekonomi Pasar Sosial” dalam Muntaqo, “Dialektika Teoretis Sistem Ekonomi Pasar Sosial Dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila (Studi Penjabaran dan Implementasi Ideologi Ekonomi dan Politik Agraria,” *Jurnal Spektrum Hukum* 11, no. 1 (2014). Gagasan tentang ekonomi pasar sosial ini relevan dengan konsep wirausaha sosial, yaitu orang-orang yang berusaha menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Periksa Gamal Albinsaid, *Era Baru Wirausaha Sosial* (Jakarta: CV Indonesia Medika, 2018), x.

¹⁴ Samuel P Huntington, *The Class of Civilizations? The Debate* (Foreign Affairs: Simon & Schuster, 1996). Lihat juga Vita Fitria, “Konflik Peradaban Samuel P. Huntington Kebangkitan Islam yang Dirisaukan,” *Humanika* 9, no. 1 (Maret 2009): 39–52.

ISLAM DAN IDEOLOGI DUNIA

Di antara yang memiliki ramalan bahwa Islam akan menjadi pesaing utama Ideologi Kapitalisme adalah Samuel P. Huntington. Dinyatakannya bahwa ke depan akan terjadi “konflik Peradaban” atau *Conflict of Civilization*. Pasca runtuhnya Ideologi komunisme dan hancurnya Uni Soviet sebagai pilar dan pendukung –sosialisme dan komunisme—maka seakan-akan tidak ada lagi ideologi yang sehebat ideologi kapitalisme. Ideologi ini lalu menjadi ideologi tunggal yang akan mengatur dunia melalui *global game* yang dimainkannya.¹⁵

Sebagai ideologi tunggal, maka keberadaan ideologi yang dikomandani oleh Amerika Serikat dengan segenap sekutunya tentu akan memainkan permainan global dalam berbagai aspek kehidupan. Baik di bidang politik, ekonomi dan bahkan juga budaya. Amerika Serikat menjadi dirijen untuk memainkan irama politik, ekonomi dan budaya dunia dan mengarahkan akan kemana selayaknya negara-negara lain sebagai pengikutnya.

Meskipun ideologi ini dianggap sebagai “dewa” yang bisa menyelamatkan dunia dengan berbagai krisis yang dihadapi, akan tetapi kenyataannya juga di dalam praksis menjadi kedodoran. Dalam bidang ekonomi, misalnya kapitalisme justru dianggap sebagai ideologi yang konvensional. Melalui ajarannya tentang “pasar bersaing bebas”, ternyata justru menjauhkan kapitalisme sebagai ideologi hebat yang bisa menyelamatkan semuanya. Kerontokan ekonomi negara-negara yang mendewakan ideologi kapitalisme menjadi bukti tentang ketidakhebatan ideologi kapitalisme sebagai solusi utama di dalam kehidupan ekonomi dunia. Runtuhnya beberapa Bank dan beberapa perusahaan di Amerika, seperti Lehman’s Brother, dan Mitsubishi tentu menjadi bukti akurat betapa ideologi kapitalisme justru memperoleh tantangan yang sangat keras.

Begitu kerasnya tantangan untuk kapitalisme ini, maka diperlukan untuk menyelamatkan kapitalisme tersebut. *How Capitalism Save Us*. Pemikiran bahwa kapitalisme akan menyelamatkan dunia memberikan gambaran betapa mereka

¹⁵ Dalam pandangan Huntington, bahwa konflik di masa depan bukan pada aspek politik dan ekonomi akan tetapi kebudayaan, yang disebut sebagai *class of civilization*. Lihat Agustam, “Kritik Terhadap Pemikiran Samuel P. Hintington Tentang Benturan Peradaban,” *Al Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 5, no. 1 (2010).

sesungguhnya sedang berada di dalam psikologi ketakutan akan hancurnya ideologi kapitalisme yang telah menjadi rujukan dan menjadi *pattern for behavior* negara di dalam mengemban tugas menyejahterakan masyarakatnya. Ada semacam kegalauan di kalangan mereka sendiri terkait dengan rontoknya beberapa negara di Eropa Barat bahkan Amerika Serikat yang selama ini bertumpu pada ideologi kapitalisme di dalam menjalankan roda ekonomi.¹⁶

Di era di mana ideologi kapitalisme memperoleh tantangan yang hebat, maka muncullah gagasan Islam kaffah atau Islam arus keras yang menjadikan Islam bukan sekedar sebagai agama akan tetapi adalah ideologi yang menyeluruh. Islam diposisikan sebagai ideologi alternative di tengah kegalauan dunia akan sistem politik dan ekonomi yang makin carut marut. Di bidang ekonomi, kemudian muncul gagasan aplikatif tentang ekonomi syariah yang juga mendunia. Gerakan ekonomi syariah yang dimotori oleh beberapa negara yang secara politis stabil, seperti Malaysia, Pakistan, Indonesia dan beberapa Negara Timur Tengah lainnya, maka secara diametral menjadi tantangan tersendiri dari sistem ekonomi kapitalisme.¹⁷

Kemunculan sistem ekonomi syariah yang makin diterima oleh masyarakat dunia juga sekaligus memberikan gambaran akan semakin menariknya sistem ekonomi syariah yang berhasil menawarkan solusi bagi ekonomi dunia. Melalui kehadiran ekonomi syariah, maka praksis ekonomi yang selama ini dikuasai oleh sistem kapitalisme menjadi tereduksi. Akibatnya, lalu banyak kalangan ekonom Barat yang menganggap ekonomi syariah menjadi pesaing yang utama. Makanya, di dalam banyak hal, perkembangan ekonomi syariah juga dihadang dengan berbagai kekuatan. Bagi pemuja sistem ekonomi kapitalis, maka sistem kapitalis adalah sistem terbaik yang dimiliki dunia dan akan dipertahankan agar tetap menjadi penguasa dunia.¹⁸

¹⁶Sebastian Dullien, *Kapitalisme Yang Layak*, Terj. Aviva Nababan (Jakarta: Friedrich-Eber Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016).

¹⁷Nur Syam, "Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Milenial," <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.

¹⁸Nur Syam, "Ekonomi Syariah: Arah Baru Ekonomi Indonesia," <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.

Tantangan lain yang tidak kalah seriusnya adalah sistem politik yang dikembangkan oleh kelompok Islam garis keras. Dengan model *khilafah* yang ditawarkannya, maka hal ini menjadi tantangan tidak terelakkan bagi sistem politik demokrasi yang dewasa ini juga mempengaruhi kebanyakan negara di dunia. Sistem *khilafah* yang dikembangkan oleh Islam di beberapa tempat, seperti di Negara-Negara Timur Tengah tentunya menjadi musuh tersendiri bagi negara-negara yang selama ini menganut sistem politik demokrasi.¹⁹

Akhir-akhir ini dunia dikejutkan oleh gerakan ideologi Islam yang sangat militan, yaitu *Islamic State of Iraq and Syria* atau yang dikenal dengan singkatan ISIS. Gerakan ini adalah kelanjutan dari Gerakan Al Qaidah yang dipimpin oleh Usamah bin Laden yang dinyatakan meninggal beberapa saat yang lalu di Afghanistan. Meskipun pemimpin tertingginya meninggal dunia, akan tetapi gerakan ini terus berlangsung. Gerakan Al Qaidah kemudian dipimpin oleh Ayman al Jawahiri yang merupakan *successor* dari Usamah bin Laden. Gerakan Al Qaeda sesungguhnya tidak akan mati.²⁰

Memang harus diakui bahwa sepeninggal Usamah bin Laden, Gerakan Al Qaeda semakin redup. Pemimpin barunya tidak dapat menggerakkan Al Qaeda dalam gerakan *massive* yang sangat kuat. Lalu perkembangan berikutnya, adalah munculnya kaum radikal yang sangat fundamental, yaitu ISIS yang belakangan menggunakan nama Islamic State (IS). Melalui kepemimpinan orang kuat, Abubakar al Baghdadi, maka jelmaan Al Qaeda ini dapat melakukan gerakan militer yang sangat kuat dan juga mendapatkan dukungan internasional meskipun dalam coraknya yang separatis. Dari IS kemudian menjadi ISIS.²¹

¹⁹ Di Indonesia, gerakan *khilafah* memperoleh momentum di Era Reformasi. Pada era ini, HAM dapat dijadikan sebagai tameng untuk berlindung dari berbagai gerakan bahkan yang “menentang” terhadap negara. Di era Presiden SBY, gerakan *khilafah* melalui Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bisa melakukan banyak manuver, di antaranya adalah Konferensi Khilafah Internasional, Deklarasi Khilafah di Bandung, dan sebagainya. Lihat Nur Syam, *Islam Nusantara Berkemajuan Tantangan dan Solusi Moderasi Agama* (Semarang: Fatawa Publishing, 2018), 121–156. Lihat juga Musafir Pabbabari, “Gerakan Syariat Islam (Studi Kasus Gerakan Hizbut Tahrir di Kota Makassar,” dalam *Aliran, Fahaman dan Gerakan Keagamaan di Indonesia*, Bashori A. Hakim (Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009), 214–221.

²⁰ Syam, 115.

²¹ Syam, 117.

ISIS ternyata mendapatkan dukungan kuat dari berbagai belahan dunia. Jika kita lihat data terakhir, maka simpatisan ISIS ternyata ada dimana-mana. Di Eropa, Amerika, Australia, Asia dan juga Afrika. Boko Haram, sebuah gerakan separatis di Afrika ternyata juga menyatakan kesetiaannya pada IS. Sebagai gerakan yang semula adalah gerakan separatis di Iraq, yang kala itu dipimpin oleh Kaum Syiah Kurdi, maka tema utama perlawanannya adalah melawan kaum militan Syiah yang menguasai pemerintahan di Iraq. Maka doktrin yang dikumandangkan di seluruh dunia adalah menggunakan terma Sunni. Itulah sebabnya, gerakan mereka disebut sebagai gerakan kaum Sunni melawan kaum Syiah.²²

Sesungguhnya, gerakan mereka adalah gerakan politik dan bukan gerakan keagamaan. Ada banyak analisis yang menyatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan murni untuk memperoleh kekuasaan melalui kekuatan senjata. Jihad yang mereka lakukan adalah jihad dengan peperangan sebagai mediumnya. Namun yang sungguh menarik untuk dicermati adalah massivitas gerakan ISIS ini di seantero dunia. Jika digunakan fakta kemenarikan gerakan ini adalah dengan terlibatnya sebagian kecil dari masyarakat Indonesia untuk berjihad melalui model ISIS ini. Mereka yang terlibat di dalam gerakan ini adalah alumni-alumni Afghanistan yang sekarang sudah banyak yang kembali ke Indonesia. Mereka menjadi agen untuk menggerakkan sebagian kecil rakyat Indonesia untuk melanjutkan gerakan jihad ofensifnya dan bergabung dengan kekuatan ISIS di Iraq dan Syria. Bahkan juga ada simpatisan yang meskipun tidak ingin memasuki kawasan konflik di Iraq dan Syria, akan tetapi memasang bendera dan menjadikan lambang ISIS sebagai simbol keyakinan akan kebenarannya. Mereka memasang bendera ISIS di beberapa tempat, misalnya di Jakarta, Palembang, Surabaya, Bandung dan beberapa tempat lainnya. Bahkan mereka juga memasang bendera ISIS di rumah-rumah.²³

Sebagai gerakan radikal, ISIS sangat ambisius untuk menguasai Iraq dan Syria. Mereka sangat keras di dalam menghabisi semua lawan-lawan politiknya. Di

²² Syam, 96–101.

²³ Syam, 93–98.

manapun mereka menguasai suatu daerah, maka mereka membumihanguskan seluruh yang dikuasainya. Semua lawan politiknya dibunuh tidak peduli apakah dia lelaki ataupun perempuan bahkan anak-anak. Pusat-pusat peradaban dunia di Iraq dan Syria juga dihanguskan. Yang terakhir adalah pemusnahan peninggalan kerajaan Assyria. Gerakan mereka benar-benar sangat radikal yang ingin menihilkan semua yang telah menjadi tradisi bagi pemerintahan sebelumnya. Dengan dasar memberantas terhadap *thaghut* atau sistem pemerintahan yang tidak Islami, maka mereka menghancurkan semua yang dipersepsikan sebagai *thaghut* tersebut.

Pertanyaannya adalah apakah gerakan ISIS ini dapat dianggap sebagai perlawanan terhadap dominasi Barat yang telah mencengkeram terhadap seluruh kekuatan dunia. Jika menggunakan terma-terma yang diusung oleh pendukung IS, maka sebenarnya pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan ya. Ada semacam hipotesis yang makin kuat menunjukkan bahwa ISIS adalah lawan dari dominasi barat yang nyata. Sesungguhnya bahwa munculnya radikalisme di manapun adalah merupakan jawaban atas produk budaya Barat yang makin kuat di berbagai negara. Produk budaya Barat yang makin populer, memunculkan ketidakpuasan kaum radikal untuk terus melancarkan agresinya. Demikian pula sistem politik yang makin secular juga membuat keresahan yang luar biasa. Sistem demokrasi yang dianggapnya antithesis terhadap system khilafah merupakan sistem politik yang harus dinihilkan. Sistem politik ini telah membawa keterpinggiran umat Islam di hampir seluruh Negara. Mereka sungguh tidak puas atas keberlakuan demokrasi yang dianggapnya sebagai model pemerintahan *secular* yang bertentangan dengan sistem politik Islam.²⁴

Dukungan kaum radikal di berbagai negara sebenarnya merupakan dukungan terhadap terma-terma yang diusung oleh Gerakan ISIS untuk

²⁴ Gerakan ISIS sesungguhnya bukanlah gerakan agama murni, artinya mereka memperjuangkan Islam sebagai agama yang *kaffah*, tetapi sebenarnya merupakan gerakan politik, yaitu penguasaan politik atas wilayah yang kaya minyak, dan menguasainya untuk kepentingan membentuk negara baru atas dasar sistem pemerintahan yang ditafsirkannya sebagai khilafah. Sebagai perbandingan, Lihat Najamuddin Khairur Rijal, "Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2017): 1–16.

menerapkan sistem *khilafah* sebagai satu-satunya solusi untuk “menolong” dan memberlakukan sistem politik Islami di dunia ini. Para loyalis gerakan *Khilafah* atau *Dawlah Islamiyah* tentu memiliki pandangan yang sama dengan Gerakan ISIS, sehingga mereka menjadi pendukung gerakan ini bahkan juga menjadi relawan untuk berjihad melalui peperangan di Iraq atau Syria. Mereka beranggapan bahwa satu-satunya kekuatan kepemimpinan yang akan mewujudkan lahirnya *Dawlah Islamiyah* adalah Abubakar al Baghdadi di Iraq dan Syria ini.

Jika digunakan konsepsi Huntington, maka pada dasarnya bahwa Islam memang bisa dijadikan sebagai ideologi oleh sekelompok orang untuk melawan hegemony barat. Merujuk pada gerakan al Qaeda lalu diteruskan oleh Gerakan IS yang makin memperoleh simpati dari gerakan-gerakan radikal lintas negara, maka bisa digambarkan bahwa gerakan ideologi Islam bisa menjadi “lawan” bagi ideologi kapitalisme dengan sistem politik demokrasi. Memang masih terlalu dini untuk menyebut sebagai “*conflict of civilizations*”, akan tetapi kiranya gambaran awal tentang “peluang” menjadikan Islam sebagai ideologi transnasional kiranya memang memperoleh “pembenaran”.

Gerakan Islam radikal tidak akan pernah mati selama masih terdapat ketidakseimbangan dalam kesejahteraan antara Negara Barat dengan dunia ketiga lainnya. Sistem kapitalisme yang membelah dunia dengan konsepsi “negara maju” dan “negara terbelakang” dan yang kebanyakan menjadi “negara terbelakang” adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, maka selama kejadian itu masih berlangsung, tentu jihad ofensif tidak akan pernah berhenti. Ketidakadilan ekonomi dan politik inilah yang menjadi penyebab dari terus munculnya gerakan radikal dengan menggunakan jargon agama di dalamnya.²⁵

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah politik *double speaks* yang selalu digunakan oleh Barat khususnya Amerika Serikat dalam relasi dengan dunia Islam, khususnya Palestina, juga akan menjadi penyebab lahirnya dan terus tumbuhnya gerakan solidaritas terhadap negara-negara Islam khususnya Negara Palestina. Apa yang dilakukan oleh “orang” Palestina terhadap “orang” Israel dianggapnya sebagai terorisme, sedangkan yang dilakukan oleh “orang” Israel

²⁵ Syam, *Islam Nusantara Berkemajuan Tantangan dan Solusi Moderasi Agama*, 116–17.

terhadap “orang” Palestina adalah tindakan melawan terorisme sehingga tidak bertentangan dengan HAM. Tindakan politik “*double speaks*” inilah yang di dalam banyak hal menjadi penyebab bagi terus berlangsungnya radikalisme di kalangan tertentu umat Islam.²⁶

Memang masih awal untuk menyimpulkan bahwa gerakan-gerakan radikal Islam sebagai bagian dari “*conflict of civilization*”, sebab yang terjadi bukanlah gerakan *massive* dari radikalisme. Namun demikian, kontinuitas dari gerakan Islam radikal yang mengusung *system Dawlah Islamiyah* atau *khilafah Islamiyah* tentu akan diuji oleh zaman apakah ideologi ini benar-benar *acceptable* bagi umat Islam di seluruh dunia dan menjadi *pattern for behavior* di dalam sistem pemerintahan ataukah hanya menjadi hiasan atau aksesori tentang perlawanan dari sebuah komunitas yang tidak memiliki pengaruh signifikan bagi keberlangsungan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kiranya juga tidak harus terburu-buru untuk menyimpulkan secara seksii, bahwa sekarang sudah berlangsung *conflict of civilization* antara Barat dan Islam atau antara ideologi kapitalisme dengan ideologi Islam.

PANCASILA DAN IDEOLOGI KEBANGSAAN

Bukan merupakan suatu kebetulan bahwa Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang hingga sekarang masih relevan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendati Pancasila juga mengalami ujian bertubi-tubi semenjak kelahirannya, akan tetapi ternyata secara sosiologi, yuridis dan kultura ternyata memiliki sejumlah kekuatan yang ada pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan dan menjadi dasar dan falsafah bagi kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.²⁷

Sebagaimana para pencetusnya, bahwa Pancasila digali dari khasanah kehidupan dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Di dalam berbagai pidatonya, Ir. Soekarno selalu menyatakan bahwa lima dasar dalam berbangsa dan bernegara tersebut yang dinamai Pancasila adalah merupakan kulminasi dari pemikiran dan

²⁶ Salah satu di antara penyebab terus berkembangnya gerakan terorisme adalah Israel, yang disebut sebagai state terrorism. Lihat Syam, 101.

²⁷ Syam, *Transisi Pembaharuan, Dialektika Islam, Politik dan Pendidikan*.

gagasan serta budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah ada semenjak kerajaan-kerajaan Hindu, Budha maupun agama-agama local tentang nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, demokrasi atas dasar musyawarah dan mufakat, persatuan bangsa dan juga kaedilan social. Nilai-nilai ini digali dari khasanah kehidupan bangsa Indonesia dan akhirnya diputuskan sebagai dasar Negara yang dikenal sebagai Pancasila.²⁸

Di dalam perdebatan baik yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pra maupun pasca proklamasi kemerdekaan, 17 Agustus 1945, maka yang dianggap cocok bagi bangsa Indonesia yang multikultural dan plural adalah Pancasila. Kenyataannya, Pancasila memang bisa menjadi perekat dari multi suku, ideologi, bahasa dan sebagainya. Jika menggunakan dasar agama sebagai keinginan untuk memperkatkan bangsa Indonesia, tentu tidaklah cocok. Semua tentu bisa mengingat bagaimana perdebatan di dalam PPKI tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, maka dengan keyakinan bahwa Pancasila dengan rumusan yang lebih mengayomi semua anak bangsa, maka hal itu dilakukan oleh ulama-ulama dan politisi-politisi yang memiliki komitmen keislaman yang sangat kuat. Proses pencabutan terhadap tujuh kata di dalam Piagam Jakarta atau *Jakarta Charter*, di dalam Sila Pertama Pancasila, yaitu: “Ketuhanan Yang Maha Esa Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, maka hal ini menggambarkan tentang bagaimana Para Ulama, Kyai dan Tokoh Islam memberikan ketulusan dan keikhlasannya untuk menjadikan Pancasila yang memberi pengayoman kepada seluruh bangsa Indonesia dengan keragaman agama, suku bangsa dan bahasa tersebut.²⁹

Dengan dasar Pancasila tersebut, Indonesia bukanlah Negara secular yang memisahkan agama dari urusan publik, dan juga bukan Negara agama yang menempatkan agama sebagai ideologi bernegara. Indonesia adalah Negara

²⁸ RI, *Pancasila di Era Globalisasi: Mengelola Tantangan Mewujudkan Kemenangan*, 43–54. Periksa juga Yudi Latif, “Demokrasi ‘Deliberative’ Indonesia,” dalam *Menelusuri Kembali Demokrasi Pancasila*, Sunarto Soedarno (Jakarta: Nusantara Institut, 2009), 93–102.

²⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 81.

berketuhanan. Konsepsi dan implementasi menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara adalah sebagaimana konsepsi Al Mawardi dan juga Al Ghazali yang menempatkan relasi antara agama dan negara dalam coraknya yang saling membutuhkan. Agama membutuhkan negara untuk mengembangkan dan melindungi agama itu sendiri, sementara negara membutuhkan agama sebagai pondasi untuk menjaga moralitasnya. Relasi ini yang oleh kaum teoretisi, disebut sebagai relasi negara dan agama yang simbiotik mutualisme.³⁰

Di dalam kerangka mengembangkan agama dan melindungi umat beragama, maka di Indonesia terdapat Kementerian Agama, yang di dalamnya terdapat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan juga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Konghucu. Di sinilah Negara hadir memberikan pelayanan kepada umat beragama. Sebagai konsekuensi agama menjadi agama publik, maka kenyataannya bahwa agama harus diatur, dilindungi, dan diberikan pelayanan bagi umatnya. Dengan demikian, maka tidak sebagaimana di negara-negara Barat yang menjadikan agama sebagai urusan privat sehingga negara tidak turut campur di dalam kehidupan beragama.³¹

Dewasa ini pertarungan ideologi memang tidak sekeras di era “Perang Dingin” antara Amerika dan Uni Soviet, akan tetapi sesungguhnya bahwa pertarungan tersebut ternyata masih ada dalam coraknya yang sporadik. Jika digunakan konsep pertarungan Islam radikal melawan Barat, maka hal ini juga tidak berada di dalam keseimbangan. Bahkan cenderung hanya merupakan letupan-letupan kecil yang tidak seimbang. Oleh karena itu pertarungan antara

³⁰ Dien Syamsuddin, “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam,” *Majalah Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan* 4, no. 2 (1993): 5–7. Lihat juga Nur Syam, *Demi Agama Nusa dan Bangsa* (Jakarta: Prenada, 2018), 180–184.

³¹ Moch. Nur Ichwan, “Official Reform of Islam, State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia 1966-2004” (Disertasi, Tilburg University, 2006).

barat dengan kapitalisme dan demokrasinya dengan Islam radikal adalah sebagaimana David melawan Goliath. Si kecil melawan Si besar.³²

Dengan ideologi Pancasila, maka tidak memungkinkan bagi bangsa ini untuk terkooptasi ke salah satu ideologi yang ada di dunia sekarang ini. Indonesia tidak terkooptasi ke sistem demokratik liberal yang diterapkan di negara-negara Barat atau terkooptasi ke demokrasi theistik sebagaimana di beberapa negara di Timur Tengah dan juga tidak terkait dengan ideologi sosialisme sebagaimana di negara-negara Amerika Latin. Dengan konsepsi negara berketuhanan, maka hal ini merupakan suatu sistem yang mengayuh di antara ekstrimitas ideologi di dunia ini, baik yang kanan maupun yang kiri, antara Kapitalisme versus sosialisme, atau antara ideologi Islam dan ideologi sekular.³³

Melalui ideologi Pancasila maka memungkinkan semua agama bisa hidup dengan damai. Suatu realitas bahwa kerukunan umat beragama di Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Negara memberikan perlindungan terhadap pemeluk agama-agama. Semua hari besar agama memperoleh penghormatan dari negara dengan dijadikannya sebagai hari libur nasional. Kiranya tidak ada negara bahkan di Timur Tengah yang memberikan sedemikian besar penghargaan kepada agama-agama. Itulah sebabnya banyak di antara pemimpin negara dan agama yang mengapresiasi terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Mereka menjadikan Indonesia sebagai laboratorium kerukunan umat beragama. Dengan demikian, Indonesia bisa memberikan sumbangan secara nyata terhadap perdamaian dunia melalui ideologi Pancasila yang memang telah teruji di dalam

³² Serangan terhadap kepentingan barat dilakukan secara individual atau *lone wolf*. Banyak kasus gerakan terorisme yang dilakukan secara sendirian. Berbagai gerakan bom bunuh diri di berbagai kota di Indonesia, baik kantor polisi, gereja atau hotel dan lainnya dilakukan oleh individu-individu. Gerakan ekstrimisme ini lebih merupakan daya kejut terhadap pemerintah bahwa gerakan ekstrim itu tidak akan pernah mati. Lihat Syam, *Demi Agama Nusa dan Bangsa*, 67–73.

³³ Pertarungan ideologi di Indonesia sesungguhnya bukan barang baru. Semenjak awal kemerdekaan telah terjadi pertarungan antara Islam politik dan Islam moderat. Di era 1980-1990an, pertarungan wacana Negara Bangsa vs Negara Syariah pun sudah merebak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Sumatera Selatan, yang melibatkan MUI, dan Organisasi Keagamaan dan Pesantren ternyata pertarungan wacana itu sudah terjadi. Ada sekelompok yang mendukung Negara Bangsa dan ada juga yang mendukung Negara Syariah. Lihat J. Suyuthi Pulungan, *Negara Bangsa vs Negara Syariah* (Yogyakarta: Gama Media, 2009), 17–63. Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno vs Natsir* (Jakarta: Teraju, 2002).

kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.³⁴ Mengamalkan ajaran agama yang benar, sesungguhnya sudah mengamalkan Pancasila dengan benar. Jadi, tidak ada pertentangan antara mengamalkan Pancasila dengan mengamalkan ajaran agama, khususnya Islam.

Ada sebuah pertanyaan menggelitik dari seorang guru pada sesi khusus *workshop* “Moderasi Beragama Untuk Membangun Harmoni dalam Masyarakat” yang diselenggarakan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, 5/12/2019, di Aula Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan. Acara ini dihadiri para guru dari daerah tiga T (terluar, terbelakang dan tertinggal) dalam tajuk acara “*Visiting Teacher* pada Guru Madrasah se Kabupaten Bangkalan”.³⁵

Pertanyaan tersebut adalah “apakah mengamalkan Islam secara *kaffah* sama dengan mengamalkan Pancasila, sebab amalan Islam yang *kaffah* itu terkait dengan seluruh amalan-amalan di dalam agama Islam, termasuk juga urusan kenegaraan? Sebuah pertanyaan yang menarik untuk direnungkan, disimak dan juga dijawab sebagai konsekuensi atas pilihan menetapkan Pancasila dan NKRI sebagai pilihan yang sangat wajar dan memang seharusnya seperti ini.

Jawaban atas pertanyaan ini sungguh tidak sederhana, sebab di dalam pertanyaan ini tentu terkandung konsepsi bahwa di dalam Islam terdapat konsepsi khilafah. Jadi artinya, bahwa di dalam urusan kekuasaan mestinya harus berpatokan pada sistem khilafah tersebut. Di sinilah kata kunci mengapa pertanyaan ini sangat mendasar dalam kaitannya dengan pilihan bernegara dan berbangsa. Pertanyaan yang sederhana tetapi rumit untuk dijawab.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam Islam terdapat variasi pola atau model kekuasaan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri juga merupakan contoh tentang bagaimana mengelola atau memanej kekuasaan tersebut. Dan yang menjadi basis regulasinya adalah Piagam Madinah, yang sudah sangat terkenal di dunia, tidak hanya di kalangan umat Islam tetapi juga orang-orang Barat. Piagam

³⁴Nur Syam, *Menjaga Harmoni Menuai Damai* (Jakarta: Prenada, 2017), 101–124. Lihat juga Syam, *Demi Agama Nusa dan Bangsa*, 111–114.

³⁵Nur Syam, “Mengamalkan Islam Sama dengan Mengamalkan Pancasila,” <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.

Madinah menjadi referensi dalam mengembangkan pola kekuasaan berbasis pada pluralitas dan multikulturalitas yang terjadi pada saat itu.³⁶

Indonesia merupakan satu contoh di antara negara-negara di dunia ini, yang menggunakan pola republik atau *jumhuriyyah*, sebagaimana negara-negara Islam lainnya yakni Mesir, Afghanistan, Pakistan dan lainnya. Sementara itu juga ada yang berpola kerajaan, seperti Arab Saudi, Malaysia dan sebagainya. Dengan demikian, persoalan negara adalah persoalan tafsir dan bukan persoalan ajaran atau teks. Menjadi kerajaan atau menjadi republik adalah *consensus* yang disepakati oleh para pendiri bangsa, penguasa dan rakyat untuk memilih mana yang terbaik di dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Saudia Arabia yang memilih bentuk kerajaan, karena pendiri Negara Saudi Arabia, Abdul Azis bin Saud, menginginkan agar keturunannya yang memegang tampuk kekuasaan di Arab Saudi. Demikian pula lainnya yang memilih sistem kerajaan. Sedangkan yang memilih *jumhuriyyah*, seperti Mesir dan negara Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah menginginkan agar sistem tersebut yang digunakannya. Jadi ada dimensi kepentingan, tujuan dan penyebab yang menjadi referensi untuk menentukan pilihan negara dengan bentuk seperti apa yang diinginkan.

Adakah pertentangan antara Islam dan Pancasila? Di dalam konteks ini dapat dinyatakan dengan tegas bahwa tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” tentu tidak bertentangan dengan prinsip “Tauhid” yang diajarkan di dalam Islam. Demikian pula Sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Di sini juga tidak ada sedikitpun kontrasnya dengan Islam. Bukankah Islam mengajarkan betapa Islam sangat menghargai dimensi kemanusiaan. Jauh sebelum Deklarasi PBB tentang Human Right, Islam sudah mengajarkan tentang prinsip-prinsip hidup berdampingan

³⁶Menurut Ahmad Syafi'i Maarif, “Konsep Negara Islam memang tidak ada bentuknya yang pasti...”, sehingga di dalam praktik penyelenggaraan negara di dunia Islam juga variatif.. Lihat Ahmad Syafi'i Maarif, “Kata Pengantar, Islam dan Negara: Mencari Platform Bersama” dalam Suhelmi, *Polemik Negara Islam: Soekarno vs Natsir*, vii–xii. Untuk memperdalam wawasan tentang Piagam Madinah silahkan periksa Abdul Aziz, *Islam Versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi* (Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri, 2016), 191–210.

dengan lainnya, mengajarkan saling kasih sayang, saling menghormati, saling menolong dan sebagainya.³⁷

Lalu sila “Persatuan Indonesia”, tentu juga tidak bertentangan dengan Islam terutama terkait dengan negara bangsa. Arab Saudi tidak pernah mengklaim bahwa Raja Saudi Arabia adalah pemimpin dunia dengan bentuk kerajaannya. Dilakukannya penghargaan atas hak kewilayahan masing-masing negara, tanpa berasumsi bahwa negara Arab Saudi adalah membentang di seluruh dunia, dan dunia di bawah kendalinya. Hanya Israel yang sekarang ini masih mengklaim wilayah Palestina sebagai bagian wilayahnya karena faktor historis. Jika menggunakan satu-satunya faktor historis-geografis sebagai ukuran menentukan wilayah negara bangsa, maka Indonesia bisa mengklaim Indochina sebagai wilayahnya, karena di masa lalu menjadi wilayah negara Majapahit. Melalui Sila Ketiga ini, maka yang diajarkan adalah agar masyarakat mencintai negara dan bangsanya.³⁸

Sila keempat, adalah bagian dari cara pemimpin kita di masa lalu untuk menafsirkan “musyawarah” sebagai inti dari bagaimana kita mengkonstruksi kekuasaan. Maka, ada yang polanya seperti di Indonesia dengan demokrasi, dan ada yang dengan sistem kekhalifahan-kerajaan sebagai pola yang digunakan dan sebagainya. Sistem demokrasi juga bervariasi sesuai dengan consensus yang dibangun di negara tersebut. Ada yang demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Jadi hal ini adalah wilayah tafsir kenegaraan berdasarkan atas konsensus bangsa melalui para pemimpinnya. Lalu, sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”. Adakah hal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Islam adalah agama “keadilan” sebagai dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, para khalifahnya, dan juga sewaktu Khalifah Umar bin Abdul Azis. Saya kira teladan-teladan tersebut yang mengilhami bagaimana rumusan sila kelima ini sedemikian hebat sebagai tujuan negara dan yang ingin diwujudkan di dalam negara Indonesia.³⁹

³⁷ Bandingkan dengan RI, *Pancasila di Era Globalisasi: Mengelola Tantangan Mewujudkan Kemenangan*, 68.

³⁸ Bandingkan dengan RI, 70.

³⁹ Bandingkan dengan RI, 71.

Di dalam konteks ini dapat dinyatakan: “menjadi umat Islam yang baik adalah menjadi warga negara yang baik”, “mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan konsekuen adalah menjadi pengamal Pancasila yang benar dan bermartabat”, “menjadi pengamal Pancasila dengan baik sama dengan telah mengamalkan ajaran agama dengan baik”.⁴⁰

Jadi, warga negara Republik Indonesia seharusnya menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan NKRI sebagai bentuk final Negara Indonesia, dan mengamalkan dengan benar, sesungguhnya telah memiliki relevansi dengan pengamalan ajaran agama Islam yang diyakini kebenarannya. Sama sekali tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila. Sama sekali tidak ada reduksi sedikitpun bahwa bernegara dengan sistem demokrasi lalu mengurangi pengamalan beragama Islam.

Demokrasi atau monarkhi adalah pilihan rasional yang dicetuskan oleh pendiri negara, dan seharusnya juga menjadi mindset dan praksis di dalam kehidupan. Saya ingin menyitir KH. Sahal Mahfudz (alm) yang menyatakan pada saat Musyawarah Alim Ulama di Surabaya (1983), bahwa Keberadaan Pancasila dan NKRI di negeri ini sudah final, sehingga tidak diperlukan lagi ideologi dan bentuk negara baru lainnya.⁴¹

Pilihan menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara dan bangsa, serta menjadikan NKRI sebagai bentuk final negara Indonesia merupakan pilihan yang tepat mengingat pluralitas dan multikulturalitas bangsa ini. Bisa dibayangkan seandainya negara ini menggunakan ideologi keagamaan, tentu dipastikan akan terjadi perpecahan, dan tidak mungkin terdapat Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan sebanyak 17.504 pulau, 1340 suku bangsa dan 546 bahasa. Tidak ada negara sedemikian plural dan multikulturalnya sebagaimana negara Indonesia. Memilih Pancasila yang tidak terdapat sedikitpun pertentangannya dengan semua agama, maka berarti Pancasila dapat menjadi payung falsafah kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman. Selain itu dengan menjadikan bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik

⁴⁰ Syam, “Mengamalkan Islam Sama dengan Mengamalkan Pancasila.”

⁴¹ Nur Syam, “Agama dan Politik: Makna Politik Bagi Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Cukir Jombang” (Tesis, Surabaya, PPs Universitas Airlangga, 1997).

Indonesia (NKRI), maka juga berarti yang diinginkan oleh para pendiri bangsa adalah kesatuan dan persatuan bangsa, dengan mengikat keanekaragaman menjadi persatuan dan kesatuan.

Dengan demikian Pancasila—secara teoretis maupun praktis—sangat memenuhi syarat sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa, sebab memang sangat relevan dengan realitas empiris bangsa Indonesia yang plural dan multikultural. Melalui pemilihan ideologi negara dan falsafah bangsa seperti ini, maka Indonesia menjadi negara besar, jumlah umat Islam terbesar, kerukunan dan toleransi antar umat beragama yang baik dan bisa menjadi rujukan bagi bangsa lain yang menginginkan perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa yang memadai. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa dapat dijadikan rujukan untuk membangun peradaban manusia yang manusiawi.

PENUTUP

Ideologi komunisme sudah berantakan dan Uni Soviet pun hancur berkeping-keping. Komunisme tidak bisa menjadi ideologi yang dapat menyangga keanekaragaman. Amerika Serikat dengan ideologi liberalisme juga tertatih-tatih di tengah persaingan global. Ideologi liberalisme dengan kapitalisme sebagai instrumennya juga mengalami masa stagnan. Islam sebagai ideologi juga digunakan oleh ISIS sebagai ideologi kekerasan. Di tengah pertarungan ideologi dunia tersebut, Pancasila telah terbukti bisa menjadi penyangga keanekaragaman bangsa.

Indonesia dengan ideologi Pancasila adalah salah satu negara yang bisa mendamaikan relasi antara agama, kemoderenan dan keindonesiaan. Melalui ideologi Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara ternyata bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk mempersatukan bangsa Indonesia.

Melalui penerapan Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka Indonesia akan dapat memberikan kontribusi nyata bagi kedamaian dunia. Sebagaimana tertuang di dalam butir-butir pemikiran yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perlunya Indonesia membangun perdamaian dunia, maka Ideologi Pancasila yang

dikembangkan di Indonesia akan bisa mewarnai terhadap perdamaian dunia dewasa ini dan yang akan datang.

Jadi, di tengah pergulatan ideologi dunia yang selalu berada di dalam nuansa konflikual, maka Indonesia dengan Ideologi Pancasila akan bisa menjadi penyeimbang yang kokoh bagi terwujudnya perdamaian dunia.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustam. "Kritik Terhadap Pemikiran Samuel P. Huntington Tentang Benturan Peradaban." *Al Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 5, no. 1 (2010).
- Albinsaid, Gamal. *Era Baru Wirausaha Sosial*. Jakarta: CV Indonesia Medika, 2018.
- Aziz, Abdul. *Islam Versus Demokrasi, Menguak Mitos, Menemukan Solusi*. Jakarta: Saadah Pustaka Mandiri, 2016.
- Dullien, Sebastian. *Kapitalisme Yang Layak, Terj. Aviva Nababan*. Jakarta: Friedrich-Eber Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2016.
- Fitria, Vita. "Konflik Peradaban Samuel P. Huntington Kebangkitan Islam yang Dirisaukan." *Humanika* 9, no. 1 (Maret 2009): 39–52.
- Huntington, Samuel P. *The Class of Civilizations? The Debate*. Foreign Affairs: Simon & Schuster, 1996.
- Ichwan, Moch. Nur. "Official Reform of Islam, State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia 1966-2004." Disertasi, Tilburg University, 2006.
- Latif, Yudi. "Demokrasi 'Deliberative' Indonesia." Dalam *Menelusuri Kembali Demokrasi Pancasila*, Sunarto Soedarno. Jakarta: Nusantara Institut, 2009.
- . *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Lay, Comelis. "Nasionalisme dan Negara Bangsa." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 10, no. 2 (November 2006): 165–180.
- Mannheim, Karl. *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*. Jakarta: Kanisius, 1991.

- Mujiati, Novita, Kusworo, dan Sunaryo. "United State During the Cold War 1945-1990, Vol.4, No. 1, tahun 2016, hlm. 39-54." *Jurnal Historia* 4, no. 1 (2016): 39–54.
- Muntaqo. "Dialektika Teoretis Sistem Ekonomi Pasar Sosial Dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila (Studi Penjabaran dan Implementasi Ideologi Ekonomi dan Politik Agraria." *Jurnal Spektrum Hukum* 11, no. 1 (2014).
- id.m.wikipedia.org. "Negara-Negara Bekas Uni Soviet," t.t. Diakses 29 Desember 2019.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Negara Bangsa vs Negara Syariah*. Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Qadri Azizy, A. *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- RI, Lembaga Ketahanan Nasional. *Pancasila di Era Globalisasi: Mengelola Tantangan Mewujudkan Kemenangan*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI-PPSA XXI, 2017.
- Rijal, Najamuddin Khairur. "Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 13, no. 1 (2017): 1–16.
- Sejarahlengkap.com. "Sejarah Runtuhnya Uni Soviet-Penyebab, Proses dan Akibat Keruntuhan," t.t. Diakses 2 Maret 2020.
- ikaamalia1807.blogspot.com. "Sistem Perekomian China," t.t. Diakses 29 Desember 2019.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam: Soekarno vs Natsir*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Syam, Nur. "Agama dan Politik: Makna Politik Bagi Penganut Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah Cukir Jombang." Tesis, PPs Universitas Airlangga, 1997.
- . *Demi Agama Nusa dan Bangsa*. Jakarta: Prenada, 2018.
- . "Ekonomi Syariah: Arah Baru Ekonomi Indonesia." <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.

- . “Era Revolusi Industri 4.0 dan Pendidikan di Masa Depan (1).” <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.
- . *Friendly Management: Kepemimpinan Sebagai Roh Manajemen*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- . *Islam Nusantara Berkemajuan Tantangan dan Solusi Moderasi Agama*. Semarang: Fatawa Publishing, 2018.
- . “Mengamalkan Islam Sama dengan Mengamalkan Pancasila.” <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.
- . *Menjaga Harmoni Menuai Damai*. Jakarta: Prenada, 2017.
- . “Pengembangan Ekonomi Syariah di Era Milenial.” <http://www.nursyam.uinsby.ac.id>, t.t.
- . *Transisi Pembaharuan, Dialektika Islam, Politik dan Pendidikan*. Surabaya: LEPKISS, 2008.
- Syamsuddin, Dien. “Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam.” *Majalah Ulumul Qur’an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan* 4, no. 2 (1993).
- Wicaksana, I Gede Wahyu. “Kedaulatan Teritorial Negara: Kepentingan Material dan Nilai Simbolis.” *Jurnal Masyarakat Kebudayaan dan Politik* 29, no. 2 (2016): 106–16.
- Wuryanto, Dika Dwimawan, dan Septina Alianingrum. “Indonesia Sebagai Tuan Rumah KTT Gerakan Non Blok X Tahun 1992.” *Avatara: e-Jurnal Sejarah Pendidikan* 5, no. 2 (Juli 2017): 289–97.